

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Corona Virus Disease (COVID-19) telah menjadi isu sentral di seluruh aspek kehidupan manusia di bumi saat ini. Hal yang dilakukan bukan lagi bagaimana memberantas atau menghilangkan keberadaan virus tersebut dari muka bumi agar kehidupan kembali seperti biasa, namun sudah pada tatanan bagaimana tetap hidup dan melaksanakan kehidupan bersama COVID-19 atau yang disebut dengan “New Normal”. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik dalam Sakernas Februari 2020, bahwa jumlah Angkatan Kerja (AK) Indonesia sekitar 137,91 juta orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,17 persen. Dari 137,91 juta angkatan kerja di Indonesia tersebut, 95,01 persen (131,03 juta) bekerja dan 4,99 persennya masih menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2020 sebesar 4,99 persen ini berarti bahwa dari 100 orang AK terdapat 5 orang yang masih menganggur. Dibandingkan kondisi Februari 2019, penduduk yang bekerja pada Februari 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 1,67 juta orang. TPT juga menurun dimana pada Februari 2019 sebesar 5,01 persen. Kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang menurut data Sakernas Februari 2020 mengalami perkembangan yang positif ini, kemudian berubah dimulai ketika pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa 2 WNI di Indonesia

terdeteksi positif COVID-19. Jumlah penduduk Indonesia yang terpapar COVID-19 kemudian terus bertambah dari hari ke-hari. Posisi pada tanggal 24 Juni 2020, juru bicara tim komunikasi gugus tugas COVID-19 melaporkan bahwa 49.009 jiwa terkonfirmasi positif dengan 19.658 jiwa telah dinyatakan sembuh dan 2.573 jiwa meninggal. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menjadikan kondisi perekonomian di Indonesia menjadi terkontraksi. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I tahun 2020 sebesar 2,97 persen. Angka tersebut melambat dibandingkan dengan capaian Triwulan I -2019 yang sebesar 5,07 persen.

Hampir seluruh sector usaha menghentikan sebagian besar aktivitas ekonominya saat pandemi ini terjadi. Banyak tenaga kerja yang terancam kehilangan pekerjaannya sehingga jatuh ke dalam zona kemiskinan. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi yang disusun oleh Kementerian Keuangan RI, menyebutkan bahwa menurut hasil BPS dan proyeksi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 2020 terdapat dua skenario yang terjadi akibat pandemi ini terhadap pengangguran dan kemiskinan. Skenario berat menyebabkan penambahan jumlah pengangguran menjadi 2,92 juta orang hingga 5,23 juta orang untuk skenario sangat berat. Data dibawa adala pekerja yang terdampak Covid-19



Hal tersebut juga akan berdampak kepada penambahan jumlah orang miskin dalam rentang 1,89-4,86 juta orang. Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan pendataan langsung terhadap pekerja terdampak COVID-19 melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Dari pendataan yang dilakukan sampai dengan tanggal 27 Mei 2020, terdapat 1,76 juta pekerja terdampak COVID-19 dari sektor formal maupun informal. Selain itu, Calon PMI yang gagal berangkat sebesar 34.179 jiwa, dan pemulangan peserta pemagangan sebesar 465 jiwa. Beberapa upaya harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini pada berbagai sektor, agar kondisi kehidupan masyarakat Indonesia tetap terjaga, seimbang dan kondusif.

Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik tidak saja negara-negara besar akan tetapi hamper seluruh negara di dunia. Rasanya tidak ada satu negarapun yang tidak terdampak pandemic COVID-19

saat ini. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak terutama pada sisi ekonomi. Indonesia yang didominasi oleh Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar.

Indonesia sebagai Negara berkembang lebih menghargai UKM sebagai penggerak perekonomian dari sector paling kecil atau micro. Faktanya usaha mikro dan menengah lebih memberikan andil yang lebih dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan melakukan penyerapan ekonomi serta membuka kesempatan lapangan kerja bagi banyak pihak. Menurut (Sembiri 2008, dalam Parinduri) perusahaan mikro atau kecil; mereka mempekerjakan lebih dari 92% angkatan kerja dan menghasilkan sekitar 38% dari produk domestik bruto bagi Negara. Dapat dibayangkan bagaimana UKM sangat membantu pergerakan perekonomian dari bawah. Dalam Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Cipta Kerja juga mendorong penguatan ekosistem UMKM dan e-commerce melalui berbagai macam kemudahan. Di antaranya terkait perizinan, sertifikasi, pembiayaan, akses pasar, pelatihan, infrastruktur digital, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta iklim berusaha di sektor *e-commerce*.

Menurut Air Langga Hartanto (2020) UU Cipta Kerja juga mengatur penguatan ekosistem e-commerce, yang dapat mendukung upaya digitalisasi UMK, meliputi antara lain percepatan perluasan pembangunan infrastruktur broadband, di mana pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi dan memudahkan dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Bagaikan

sebuah anomali, perkembangan ekonomi digital malah semakin pesat di tengah masa pandemi ini. Pandemi Covid-19 memang mengubah perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis para pelaku usaha. Pasalnya, terjadi *shifting* pola konsumsi barang dan jasa dari luring (offline) ke daring (online); trafik meningkat sekitar 15%-20% .BPS.go.id (2021).

Dari sisi pelaku usaha, sebanyak 37% konsumen baru memanfaatkan ekonomi digital pascapandemi. Selain itu, 45% pelaku usaha juga aktif melakukan penjualan melalui e-commerce selama pandemi. Perkembangan teknologi digital semakin pesat, khususnya semenjak pandemi Covid-19. Hal ini juga mendorong perilaku masyarakat untuk berbelanja daring. Tak heran, platform perdagangan elektronik menjadi laris manis sebagai pilihan masyarakat untuk berbelanja dan bertransaksi.

Dari berbagai hal yang ada terkait digitalisasi UMKM yang ada, Sandiaga Uno (Kemenkraf) disaat kunjungannya kepada UMKM-UMKM di Ponorogo ingin mendukung produk-produk UMKM Ponorogo melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Gayung bersambut bahwa pada 2022 setelah pandemic mulai reda masyarakat di Kabupaten Ponorogo khususnya mulai mampu mengadopsi gaya marketing terbaru pada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, BukaLapak serta e-commerce lainnya.

Ponorogo dikenal juga sebagai kota tradisional yang ada di Jawa Timur bagian selatan, Ponorogo memiliki segudang sumberdaya dan keunikannya yang harusnya dapat dikembangkan dan dikenalkan secara luas kepada

masyarakat banyak, untuk itulah prasaran digital seperti jejaring social dibutuhkan untuk menciptakan keberhasilan dalam pengenalan produk-produk asli ponorogo, dalam hal ini PERDAGUM sebagai lembaga payung HUKUM yang banyak Menaungi UMKM memiliki peran penting dalam terealisasinya Digitalisasi UMKM atau UMKM yang go public secara metode penjualannya. Untuk itulah diambil Studikamus tentang PERAN PERDAGUM PONOROGO DALAM PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN PONOROGO

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi konsep pemerintahan berbasis digital pada pengembangan UMKM di Kabupaten Ponorogo?
2. Kendala apa yang dihadapi pemerintah dalam mengembangkan UMKM berbasis Digital?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi konsep pemerintah berbasis digital pada pengembangan UMKM di Kab. Ponorogo.
2. Menganalisis Kendala yang dihadapi pemerintah pada pengembangan UMKM Konsep Digitalisasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintah serta ilmu lain yang terkait dengan hasil penelitian ini. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan pada masa mendatang.
2. Secara praktis memberi masukan kepada pihak pemerintah daerah setempat dalam kebijakan pengelolaan Digitalisasi UMKM

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah memahami konsep dalam penelitian ini akan di jelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Perdagkum

instansi yang dibentuk pemerintah untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah khususnya dalam pengembangan koperasi dan UKM. Adanya program kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah dengan pengusaha besar bisa membantu pertumbuhan usaha rakyat ini. Peran pemerintah disini sebagai penghubung antara pengusaha kecil dan pengusaha besar

## **F. Landasan Teori**

1. Kebijakan Publik

Analisis kebijakan adalah salah satu metode atau teknik yang digunakan dalam studi kebijakan publik dalam rangka untuk

menyediakan informasi serta alternatif pilihan bagi para formulator dalam proses pembuatan kebijakan. Merujuk Dunn (1994: 35), analisis kebijakan adalah, kompleksitas masalah publik mendorong para pembuat kebijakan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya dengan menggabungkan pengetahuan dengan realitas politik yang ada. Tujuannya agar para formulator dapat menyusun kebijakan yang dapat diimplementasikan sesuai latar belakang masalah, kultur, dan juga kepentingan politik yang tidak tampak.

Merujuk definisi Dunn (1994) ini, maka analisis kebijakan merupakan teknik atau metode lebih lanjut dari studi kebijakan. Sebab kebijakan misalnya, kerap diartikan sebagai apa yang pemerintah lakukan ataupun tidak lakukan (Dye, 2013:3). Maknanya, kebijakan adalah tujuan yang dinyatakan secara resmi (oleh pihak berwenang) yang didukung pula oleh sanksi.

Tetapi definisi Dye menjadi sempit dari tujuan awal studi kebijakan seperti yang digagas Lasswell. Lasswell (1971) sebagai tokoh awal pencetus studi kebijakan menjelaskan bahwa studi kebijakan bukan hanya perkara teknis tetapi mengarah pada peran pengetahuan dalam memproses (menyusun dan melaksanakan) kebijakan. Oleh karena itu, studi kebijakan dirancang melampaui berbagai disiplin ilmu, baik ilmu politik, sosiologi, antropologi, administrasi, psikologi, maupun ilmu-ilmu lainnya. Namun malangnya, baik studi kebijakan maupun analisis kebijakan saat ini sebagian besar gagal mengambil pandangan Lasswell



tersebut. Analisis kebijakan sebagai contoh, hanya mengambil orientasi empiris yang diarahkan kepada praktik manajerial saja (deLeon & Vogenbeck, 2007).

Akibatnya, analisis kebijakan dianggap kurang berhasil memberikan pengetahuan berorientasi masalah, atau dalam bahasa sederhana, analisis kebijakan gagal menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan (Bilotta et al., 2015).

Di mana inti dari pendekatan ini menempatkan ide sebagai materi kebijakan dalam latar institusional atau situasional tertentu. Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penanganan wabah COVID-19, maka pendekatan Marsh & Smith (2000) dimanfaatkan dengan mengkombinasikannya dengan pendekatan implementasi Edward III dalam Agustino (2020). Apa yang disampaikan oleh Edward III dalam hal pelaksanaan kebijakan? Pertama, komunikasi, yang mengelaborasi mengenai koordinasi antar-aktor yang jelas dan konsisten. Kedua, struktur birokrasi, Banyaknya pro dan kontra seputar kinerja pemerintahan selama ini acap kali melahirkan berbagai paradigma dari khalayak umum. Hal ini tentu menjadi catatan sepanjang masa untuk menjadikan birokrasi ini semakin baik. Adapun ciri-ciri birokrasi yang harus dikembangkan pada masa pemerintahan sekarang ini ialah (Thoha, 1996) :

- a. Pemerintah katalis yang lebih berfungsi sebagai fasilitator, bukan lagi sebagai implementator.

- b. Pemerintah sinergis yang mampu melihat kelemahan sendiri dan kebaikan.
- c. Pihak lain dan kemudian mengupayakan perbaikan yang lebih komprehensif dan produktif.
- d. Pemerintah dari satu masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat bukan hanya untuk mengatur saja.
- e. Pemerintah yang kompetitif yang mampu meng-energized semangat kompetitif dalam pelayanan publik.

Dari kelima point diatas, UMKM harusnya dapat disinergikan dengan baik guna mampu mengentaskan permasalahan yang ada akibat pandemic Covid-19.

## 2. UMKM Sebagai Instrument Kebijakan

Kenyataan dilapangan pada saat ini nyatanya sangat berpengaruh dengan apa yang akan kita harapkan pasalnya perusahaan mikro kecil dan menengah sering kekurangan akses pada keuangan Eksternal (permodalan usaha) dan bergantung pada pekerja yang diperoleh dari dalam keluarganya, sehingga apabila terjadi perubahan dalam hal keuangan perusahaan kecil mereka pastinya akan lebih mudah terjangkit masalah. Ditambah lagi apabila yang dipekerjakan adalah dari keluarganya maka dapat dipastikan bila mereka memiliki masalah keluarga, perusahaan akan lebih mungkin kehilangan pekerjanya dan tentunya akan berimbas pada segi keuangan mereka.

UMKM sebagai Local Heroes pada 2019 lalu mampu menyumbangkan PDB sebesar 60% serta penyerapan tenaga kerja sebesar 90%, (Bps.go.id).

Laporan dari Asia Pasific SMB Digital Maturity pada 2020 optimis digitalisasi UMKM di Indonesia bisa meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Sebesar \$160-164USD Miliar pada 2024, serta kontribusi yang nyata pada pemulihan ekonomi pasca pandemic. Melihat data tersebut UMKM memang wajib diberi perhatian lebih guna mengentaskan perekonomian Indonesia dari krisis dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga perlu diimbangi kebijakan pemerintah untuk tidak menekan UMKM sedemikian rupa disektor food bavarage serta produk-produk fast moving consumer good yang nyatanya mampu menggerakkan perekonomian melalui pasar-pasar tradisional.

Oleh karena itu pada penulisan kali ini penulis akan lebih melihat pada perlambatan perkembangan usaha micro berbasis rumah tangga produksi dalam mengembangkan bisnisnya. Masalah-masalah seperti sumberdaya keuangan internal yang perlu dicukupi mengingat adanya pandemic pada era sekarang rasanya akan sangat sukar untuk dijalankan. Menurut KPCPEN ( Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) Ari dalam VIVA.co.id UKM perlu berevolusi ketahap yang lebih mutakhir yakni melalui digitalisasi UMKM, karena pada dasarnya perluasan akses pasar pastinya mampu menambah exposure dari UMKM yang mendigitalisasi perushannya. Negara

sendiri dalam hal ini membantu membuat sarana dan prasarana guna menunjang percepatan digitalisasi tersebut.

Menurut Menteri Koperasi dan usaha kecil menengah Tenten Masduki Indonesia memiliki momentum penting dalam era pandemic pada saat sekarang yakni mendorong UMKM nya menjadi berbasis digital. Fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa UMKM mengalami peningkatan Digitalisasi yang sebelumnya 8 juta UMKM menjadi 12,1 juta UMKM yang sudah terdigitalisasi. Menurut world bank sendiri pada tahun 2021 80% UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital memiliki daya juang yang lebih tinggi ditengah pandemic yang terjadi.

Umumnya semua ini juga harus dibarengi dengan permodalan yang kuat seperti waktu krisis tahun 1998, yang mana pada saat itu banyak sekali subsidi langsung kepada umkm diseluruh lapisan masyarakat, tentunya jika kita bicara Kredit Usaha Rakyat (KUR) masyarakat didaerah lebih mengenal pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia guna mencukupi kekurangan likuiditas dari perusahaan kecil mereka. Hal ini dibarengi oleh banyak pendapat para ahli yang menglegalkan bahwa segala tingkat keberhasilan dan kegagalan mereka hampir seluruhnya dipengaruhi oleh tingkat likuiditas yang mereka miliki.

### 3. Kebijakan yang diambil Pemerintah

Salah satu solusi penting pemulihan UMKM adalah insentif bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat di

2020 dan dilanjutkan di 2021. Hasilnya adalah sebagian sektor informal dan UMKM dapat bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19. Artinya tidak mengalami krisis yang sangat berat dibandingkan beberapa industri besar. Selain itu, program ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan pemutusan hak kerja (PHK) pada UMKM. Pasalnya, berdasarkan data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 760 ribu orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal (CNBC Indonesia, 28 April 2021). Dari total anggaran sebesar Rp 699,43 triliun hingga 11 Mei 2021 realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai Rp172,35 triliun. Realisasi anggaran sebesar 24,6% dari total anggaran tersebut meningkat Rp49,01 triliun dari realisasi triwulan I, yakni Rp123,26 triliun. Adapun sektor-sektor tersebut, yakni kesehatan sebesar Rp24,90 triliun atau 14,2% dari pagu Rp175,22 triliun, perlindungan sosial terserap Rp56,79 triliun atau 37,8% dari pagu Rp150,28 triliun, program prioritas Rp21,8 triliun atau 17,6% dari pagu Rp123,67 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp42,03 triliun atau 21,7% dari pagu Rp193,53 triliun, dan insentif usaha Rp26,83 triliun atau 47,3% dari pagu Rp56,72 triliun. Di sisi lain, percepatan penyaluran perlindungan sosial Pemerintah juga tampak dari besarnya serapan anggaran itu. Dalam penyaluran dana PEN atau dukungan UMKM secara khususnya, pemerintah harus memastikan bahwa dana dukungan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurang terintegrasinya data

UMKM yang ada. Selain itu, skema dukungan UMKM melalui subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) juga perlu mendapat perhatian lebih mengingat masih banyaknya UMKM yang masih belum tersentuh layanan perbankan. Hingga 11 Mei 2021 tercatat realisasi penyaluran bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp13,83 triliun atau 48,19% dari anggaran Rp28,71 triliun. Lalu, realisasi kartu sembako mencapai Rp17,24 triliun atau 38,20% dari anggaran Rp45,12 triliun. Kemudian, realisasi penyaluran bantuan sosial tunai (BST) mencapai Rp11,81 triliun atau 98,39% dari anggaran Rp12,0 triliun dan program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa mencapai Rp2,51 triliun atau 17,41% dari anggaran Rp14,4 triliun (Media Indonesia, 18 Mei 2021). Sedangkan, khusus untuk program Dukungan UMKM telah terealisasi sebesar Rp40,23 triliun atau 20,8% dari pagu sebesar Rp191,13 triliun. Realisasi untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp12,8 triliun atau sebesar 88,11% dari pagu yang mencapai 15,36 triliun (Kemenkeu, 6 Mei 2021).

#### 4. Digitalisasi UMKM

Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM on boarding. Pada 2030 targetnya jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta. Perluasan ekspor produk Indonesia bagi UMKM juga dilakukan melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD) di

2020. Dari 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal (CNBC Indonesia, 28 April 2021). Dorongan UMKM untuk memanfaatkan platform digital sangat dibutuhkan apalagi pada kondisi pandemi saat ini. Pemanfaatan platform digital dapat meningkatkan efisiensi serta menambah saluran penjualan/ pemasaran sektor UMKM yang saat ini terbatas akses fisiknya dengan pelanggan/pengguna jasa.

### **G. Definisi Operasional**

1. Implementasi Konsep Pemerintahan berbasis digital pada Penelitian ini dapat diukur menggunakan Indikator
  - a. Kebijakan Publik
  - b. Pelatihan
2. Keberhasilan Digitalisasi UMKM pada penelitian ini dapat diukur menggunakan Indikator
  2. *E-commerce*
  3. *Branding* Produk
  4. *Marketplace Online*

### **H. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini adalah suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pendekatan Digitalisasi Umkm Yang Dijadikan Kebijakan Publik Sebagai

Pendekatan Yang Dilakukan Pemerintah Ponorogo Guna Mengatasi Keterlambatan Perekomian Yang Terjadi Akibat Covid-19. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interaksional atau mikro dengan analisis kualitatif yang selanjutnya dianalisis secara logis dan sistematis, serta dengan menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus menurut Mills dan Huberman (dalam Sugeng, 2006 : 53). Sedangkan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250)

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian skripsi ini adalah di wilayah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

## **3. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli.



Dalam penentuan informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Penentuan informan dilakukan dengan cara memilih atau menentukan langsung jumlah informan sebanyak 3 orang. Informan dalam penelitian ini adalah Staff Kepala Perdagkum Ponorogo, Ketua HIPMI Ponorogo dan Owner Tukul Sport Ponorogo. Alasan memilih informan karena orang- tersebut lebih paham dan mengetahuinya. Selain itu, mereka adalah Para penggiat dalam studi kasus yang ingin diangkat pada penelitian ini. Dalam bab ini Peneliti memaparkan beberapa bagian yang berkenaan dengan pelatihan yang dilakukan dan kebijakan untuk mendorong warganya berevolusi dalam mengembangkan perekonomiannya melalui digitalisasi UMKM yang ada dalam lingkup Kabupaten Ponorogo.

Adapun pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dapat menemukan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain. Penelitian mengenai Digitalisasi Umkm Yang Dijadikan Kebijakan Publik Sebagai Pendekatan Yang Dilakukan Pemerintah Ponorogo Guna Mengatasi Keterlambatan Perekonomian Yang Terjadi Akibat Covid-19. informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Staf Perdagkum Ponorogo
2. Ketua HIPMI Ponorogo
3. Owner Tukul Sport Ponorogo.

#### **4. Sumber Data**

1. Data primer, yaitu Dalam penelitian ini Menurut Maolani dan Cahyana (2015) “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber ini bisa orang, alat pengukur atau instrumen-instrumen di laboratorium dan sebagainya.” Dalam pengambilan data langsung ini peneliti menggunakan alat yaitu manusia untuk memperoleh data seakurat mungkin. Data primer yang akan didapatkan oleh peneliti menggunakan observasi dilapangan. Selain itu juga data primer berasal dari wawancara yang dilakukan peneliti pada narasumber yang telah ditentukan.
2. Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui sumber pendukung lainnya seperti berupa data fisik dokumen yang bisa berupa hasil laporan pertanggung jawaban ataupun data yang di perlukan untuk peneliti tetapi tidak dapat di sampaikan secara lisan atau langsung dari informan, buku sebagai acuan dalam pemahaman konsep dan teori yang berkaitan dengan digitalisasi UMKM yang di lakukan pemerintah Kab. Ponorogo, jurnal sebagai tambahan data untuk konsep dan teori yang di gunakan untuk bahan refrensi riset dan juga menjadi patokan dasar apabila ada riset yang membahas mengenai implementasi konsep pemerintahan berbasis digital pada pengembangan umkm di kabupaten ponorogo

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

**a. Observasi**

“Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan hal-hal lainnya yang dapat langsung diamati oleh peneliti. Jadi, dalam observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian”. (Maolani dan Cahyana, 2015) Setelah mengetahui hal tersebut maka peneliti akan langsung melakukan tinjauan lapangan dan melihat program-program yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah Kab Ponorogo dalam hal ini adalah pelatihan-pelatihan yang dilakukan perdagkum dengan HIPMI.

**b. Wawancara**

Wawancara Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2016) “Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” Wawancara terbagi menjadi tiga macam yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak struktur. Dalam penelitian ini peneliti mengambil wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menggali ide-ide serta pemaparan masyarakat desa dan lembaga pemerintahan desa yang terlibat, dengan pertanyaan yang telah ditentukan berdasarkan kebijakan implementasi konsep pemerintahan berbasis digital pada pengembangan umkm di kabupaten ponorogo.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan upaya pengumpulan informasi yang berupa arsip- arsip yang tertulis ataupun catatan yang dimiliki oleh instansi, organisasi ataupun perorangan. Dokumentasi bisa berupa video, rekaman suara, gambar atau pun karya-karya. Dokumentasi menjadi hal yang penting dalam penelitian karena bisa menunjukkan bukti dari informasi yang ada dilapangan. Dengan adanya dokumentasi bisa menguatkan data ataupun informasi pada penelitian ini. peneliti akan mencari dokumentasi pendukung terkait kebijakan implementasi konsep pemerintahan berbasis digital pada pengembangan umkm di kabupaten ponorogo.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dikembangkan untuk memberikan makna (*making sense of*) terhadap data, menafsirkan (*interpreting*), atau mentransformasikan (*transforming*) data ke dalam bentuk-bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan yang bernuansa proposisi-proposisi ilmiah (*thesis*) yang akhirnya sampai pada kesimpulan-kesimpulan final. Kunci pokok dalam analisis data kualitatif adalah menjawab pertanyaan *how did the researcher get to these conclusions from these data?* (bagaimana peneliti sampai pada kesimpulan-kesimpulan dengan bertolak pada data yang ada?) (Pawito, 2007 : 101).

Teknik analisis dan penafsiran data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang direkomendasikan Miles dan Huberman (2014), yang lazim disebut dengan *interactive model*. Teknik analisis ini pada dasarnya

terdiri dari tiga komponen, yakni Kondensi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan.

a. Data Kondensasi

Miles dan Huberman (2014: 10) “*Data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions*”. Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Miles dan Huberman membatasi penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dimulai dengan proses mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Karena data dalam penelitian kualitatif biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data pada umumnya diyakini sangat membantu proses analisis.

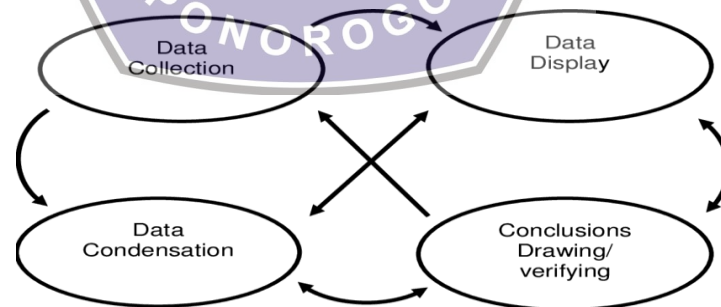
Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Gambar-gambar dan diagram yang menunjukkan keterkaitan antara gejala satu dengan yang lain sangat diperlukan untuk

kepentingan analisa data.

c. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan

Pada komponen terakhir ini, peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat. Adakalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan final tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh data yang ada (Miles dan Huberman, 2014 : 16).

Dalam kaitan ini peneliti mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti. Ketiga proses analisis data tersebut merupakan satu kesatuan yang saling menjelaskan dan berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Hubungan ketiganya dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.1**

**Komponen Analisis Data : Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana**

**7. Teknik Keabsahan Data**

Validitas (kesahihan) merupakan jaminan bagi kemantapan kesimpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian. Validitas data akan membuktikan apakah

hasil penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Agar data hasil penelitian ini valid, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, selanjutnya ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan paling bisa diterima (H.B. Sutopo, 2002 : 78).

Dari empat macam teknik triangulasi yakni triangulasi data (disebut juga triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti, penelitian ini menggunakan triangulasi data, artinya, peneliti menggunakan berbagai macam sumber data agar data yang diperoleh teruji kemantapan dan kebenarannya. Dengan demikian akan bisa didapatkan hasil penelitian yang teruji validitasnya serta dapat dipertanggungjawabkan apabila suatu saat diperlukan verifikasi. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teori.